

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:  
STUDI TENTANG KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH DI BPRS AHMAD DAHLAN KLATEN**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**KRISNA BAYU AJI ARYANTO**

**C100140231**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:**  
**Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah**  
**di BPRS Ahmad Dahlan Klaten**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**KRISNA BAYU AJI ARYANTO**  
**C100140231**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:**

**Studi Tentang Kedudukan Dewan Pengawas Syariah  
di BPRS Ahmad Dahlan Klaten**

**OLEH**

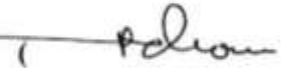
**KRISNA BAYU AJI ARYANTO**

**C100140231**

**Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari 11 November 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Dr.Kelik Wardiono, S.H.,M.H  
(Ketua Dewan Penguji)

(  )

2. Wardah Yuspin. S.H.,M.Kn.,Ph.D  
(Anggota I Dewan Penguji)

(  )

3. Inayah, S.H.,MH  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )

**Dekan,**



**(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum)**  
**NIK. 537/ NIDN. 0727085803**

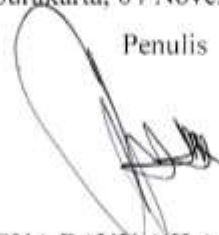
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat atau yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 November 2019

Penulis



**KRISNA BAYU AJI ARYANTO**

**C100140231**

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH:  
STUDI TENTANG KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
DI BPRS AHMAD DAHLAN KLATEN**

**Abstrak**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPS di BPRS Ahmad Dahlan Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) yang melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syariah dibawah pengawasannya, yang wajib dibentuk oleh setiap BPRS dan berkedudukan di kantor pusat BPRS, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syari'ah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS

**Kata Kunci:** dewan pengawas, dan bprs.

**Abstract**

The development of Sharia banking in Indonesia from year to year continues to increase. With the publication of Law No. 10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 on banking followed by the issuance of a number of implementation provisions in the form of the decision letter (SK) Board of Directors BI/regulation of Bank Indonesia, has provided a stronger legal basis for the development of Sharia banking in Indonesia. Sharia banking industry is actually run based on sharia principles and systems. The Shariah Supervisory Board (DPS) which is the extension of the National Sharia Council (DSN) to straighten the transaction transactions. With good supervision, there will be a form of application of Sharia products that really correspond to those established by the DSN. In an effort to purify the service of sharia financial institutions to fully align with Islamic sharia provisions, the existence of Sharia supervisory Board (DPS) is absolutely necessary. This research aims to determine the position of DPS in BPRS Ahmad Dahlan Klaten. The results showed that the position of Sharia supervisory Board (DPS) is a representative of the National Sharia Council (DSN)

which conducts periodic supervision on sharia financial institutions under its supervision, which must be established by each BPRS and domiciled by the Central office of BPRS, who have the duties and responsibilities of providing advice and advice to the board of directors and supervising the application of Sharia principles in gathering funds, financing and services activities BPRS

**Keywords:** board of trustees, and bprs.

## 1. PENDAHULUAN

Minat Islam dan kecenderungan masyarakat terhadap wacana ekonomi cukup beragam, bahkan dapat dikatakan jika animo masyarakat terhadap jasa ekonomi islam semakin hari semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan-bank maupun nonbank-berbasis syariah dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa dari lembaga-lembaga tersebut. Meskipun ekonomi islam membahas berbagai aspek ekonomi, perbankan syariah (*Islamic Banking*) saat ini dianggap sebagai karakteristik penentu sistem ekonomi Islam (Al-Shodiq, 2015).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.10 1998 yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki melalui dewan pengawas syariah (Huda, 2009).

DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan

upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar Bank Syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam (Ahmad, 2006).

Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta perannya dalam pengawasan syariah untuk menciptakan perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai dengan prinsip serta aturan syariah. Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan restrukturisasi, *reschedule*, cara penetapan margin, dan lain sebagainya (Baharuddin, 2008).

## **2. METODE**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu (Waluyo, 2008). Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait

dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum *in-concreto*.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu masalah yang terkait dengan Kedudukan Dewan Pengawas Syariahdi BPRS Ahmad Dahlan Klaten. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan cara menggunakan penelitian studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara mencari, mempelajari, dan menginventarisasi, dokumen dokumen hukum yang terkait dan berhubungan dengan objek yang dikaji.

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Pada BRPS Ahmad Dahlan Klaten**

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan wakil Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah dibawah pengawasannya, yang wajib dibentuk oleh setiap BPRS dan berkedudukan dikantor pusat BPRS, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syari'ah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS.



Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Ahmad Dahlan Klaten sudah ada sejak beroperasinya BPRS. BPRS Ahmad Dahlan Klaten mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2009 dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia atas terpenuhinya persyaratan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu syaratnya yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan yang mempunyai prinsip syariah baik Bank Syariah maupun Bank Umum Syariah yang dalam hal ini adalah BPRS. Sejak berdirinya BPRS Ahmad Dahlan Klaten hingga saat ini sudah menjabat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak 2 (dua) orang yaitu Bapak Muhammad Supawi sebagai ketua DPS, selain menjabat sebagai DPS di BPRS Ahmad Dahlan Klaten beliau juga menjadi dosen di Universitas Batik Surakarta, kemudian ada anggota DPS yaitu Bapak Muhammad Marjuki, selain sebagai DPS beliau juga sebagai dosen IAIN Surakarta di Fakultas Syariah.

Dengan adanya surat rekomendasi dan penetapan DPS dari DSN-MUI dan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia maka kedua DPS tersebut di atas mempunyai peran sebagai pengawas dan berdiri sendiri sehingga tidak ada campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPS. DPS juga tidak memihak siapapun dalam mengawasi kegiatan BPRS Ahmad Dahlan Klaten agar sesuai dengan prinsip syariah yang ada di Fatwa DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah, sehingga dalam mengawasi operasional kegiatan BPRS, DPS tidak memihak siapapun. Hal ini seperti yang terdapat di BPRS Ahmad Dahlan Klaten bahwa dalam mengawasi operasional BPRS, DPS tidak memihak siapapun dan apabila ada seorang karyawan, manajer bahkan pengelola BPRS yang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS wajib untuk menegur dan memberi nasihat.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Penerapan

mekanisme pengawasan DPS di BPRS Ahmad Dahlan Klaten sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DSN-MUI memberikan tugas kepada DPS untuk: Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, bahkan di BPRS Ahmad Dahlan Klaten anggota DPS mengadakan rapat pengawasan terhadap akad-akad pembiayaan adalah 3 bulan sekali dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada OJK, DSN-MUI dan BI, dan merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS BPRS Ahmad Dahlan Klaten harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS BPRS Ahmad Dahlan Klaten bukan didasarkan pada keilmuannya, sudah dapat dipastikan, fungsi pengawasan BPRS Ahmad Dahlan Klaten tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktik syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

#### **4. PENUTUP**

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan wakil Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah dibawah pengawasannya, yang wajib dibentuk oleh setiap BPRS dan berkedudukan dikantor pusat BPRS, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syari'ah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Adapun saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini untuk BPRS Ahmad Dahlan Klaten penulis menyarankan dalam pemilihan dewan pengawas, benar-benar dilakukan dengan baik sesuai dengan kababilitas dan kompetensi dari orang-perorang, dan mengingat pentingnya kedudukan dewan pengawas, selain memiliki pemahaman agama yang baik juga mengerti tentang dunia perbankan sebagai antisipasi persaingan antar lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan.

Penulis juga memberikan saran agar dewan pengawas tidak hanya menjadi stempel untuk memenuhi persyaratan Dewan nasional Syariah, namun betul-betul melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan dari BPRS Ahmad Dahlan Klaten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Harist, Jaribah bin Ahmad. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifah Pustaka Al-Kaustar Group.
- Al-Shodiq, Mukhtar. (2005). *BriefcasebooksEdukasi Professional Syariah: Fatwa-Fatwa SyariahKontemporer*. Jakarta: Renaisan.
- Baharuddin, Susanto. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. (2009). *Curent Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Kencana.